

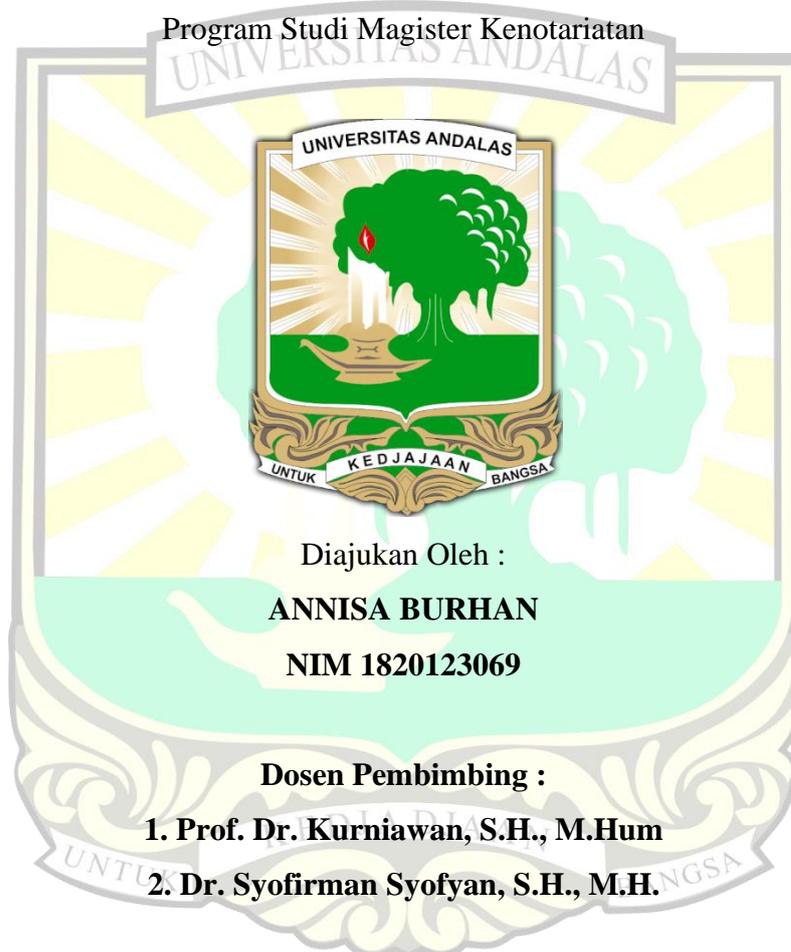
**PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG
– PEKANBARU DI NAGARI KASANG KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana Strata-2

Program Studi Magister Kenotariatan



Diajukan Oleh :

ANNISA BURHAN

NIM 1820123069

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Kurniawan, S.H., M.Hum

2. Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

ABSTRAK

Sebagai perwujudan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Negara diberikan kuasa untuk menjalankan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan terhadap bumi, air dan kekayaan alam Indonesia dengan tetap memperhatikan kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut salah satu contohnya adalah pembangunan jalan tol. Agar tetap memperhatikan kemanfaatan bagi pemilik tanah, maka pemerintah memiliki solusi dengan melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan peraturan dasar yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Masalah yang timbul kemudian dari pengadaan tanah yaitu lambannya proses pembebasan lahan disebabkan masyarakat tidak mau memberikan tanahnya akibat ganti rugi yang diberikan pemerintah dinilai sangat kecil. Permasalahan yang menjadi objek penelitian diantaranya : 1) Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman? 2) Bagaimana pelaksanaan musyawarah penentuan bentuk dan besar ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman? 3) Bagaimana Penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sumber data yang digunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, bahwa dalam hal penentuan ganti kerugian yang dinilai terlalu kecil pemerintah tetap melaksanakan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tersebut dengan menggunakan metode Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan (Konsinyasi) agar pembangunan bisa tetap dilaksanakan. Pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dan masyarakat Nagari Kasang, tidak adanya penyampaian hasil ganti kerugian yang jelas dan memiliki kepastian hukum, dengan demikian hal tersebut mengakibatkan sengketa dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Nagari Kasang. Penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Nagari Kasang tidak menemui kesepakatan, maka dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman, dengan cara penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman tersebut.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Jalan Tol, Ganti Kerugian, dan Nagari Kasang